HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: SENIN
26 OKTOBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

Berawal dari Teriakan Nama, Dada Kiri Ditikam Senjata Tajam, Rizki Tewas Lima Menit Setelah Tiba di RSUD Baubau



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Seorang pria bernama Rizki meninggal dunia setelah ditikam menggunakan senjata tajam di Jalan Murhum, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 04.00 WITA. Polisi menduga peristiwa tersebut dipicu rasa jengkel seorang pria berinisial GL (22) setelah namanya diteriaki korban.

KBO Reskrim Polres Baubau Ipda Zabar Sam mengungkapkan, kejadian bermula ketika korban bersama rekannya, Farel, berjalan menuju kios 24 jam di seberang Toko Rizal Karpet sekitar pukul 03.30 WITA. Keduanya hendak mengambil kardus untuk dijadikan alas tidur setelah menghadiri pesta kampung di Kelurahan Gonda dan makan di Mie Transit.

Saat perjalanan kembali, GL melintas menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam. Korban kemudian meneriaki nama GL. Menurut keterangan saksi yang disampaikan polisi, GL berhenti, memarkir kendaraannya, lalu menghampiri korban dan menikam bagian dada kiri, tepat di

Lanjut ke Hal: 7

Penertiban Ternak di Buton Selatan Terhambat Perda, PPNS dan Kendaraan Operasional



Laporan: FIRMAN, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Penertiban hewan ternak yang berkeliaran di kawasan perkantoran Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, belum berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi, ketiadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta minimnya sarana operasional. Kondisi tersebut membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat harus mencari pola penanganan yang efektif tanpa mengabaikan keselamatan petugas dan kepastian

Kepala Satpol PP Buton Selatan La Ode Nurunani, S.Sos., mengatakan persoalan sapi yang berkeliaran dan mengotori lingkungan perkantoran masih berulang meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, menggelar pertemuan di tingkat kelurahan, serta meminta pemilik ternak menandatan-

Lanjut ke Hal: 7

Festival Burangasi 2026 Bidik Kalender Event Nasional, Angkat Warisan Budaya Leluhur ari Pangibi dan Manggaru,



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Festival Budaya Burangasi yang memasuki penyelenggaraan keempat pada 2026 didorong masuk ke dalam Kalender Event Nasional. Kegiatan yang berlangsung pada 17-24 Oktober 2026 di Desa Burangasi, Kecamatan

Lanjut ke Hal: 7

Revitalisasi 17 Sekolah di Baubau Capai 50 Persen untuk Sembilan SD dan Delapan SMP, Pemkot Perkuat Pengawasan, Dana Cair 70 Persen

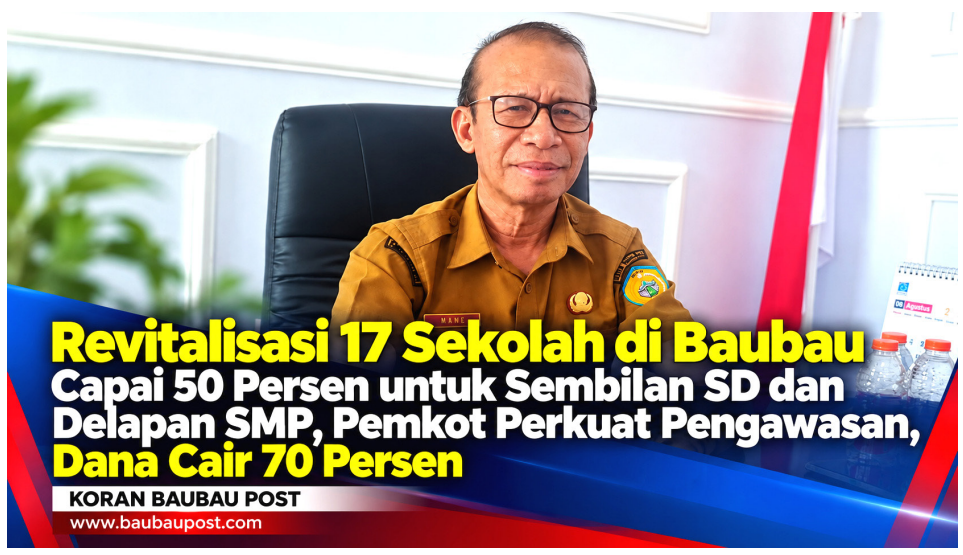

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, terus membenahi infrastruktur pendidikan melalui program revitalisasi 17 gedung sekolah yang terdiri atas sembilan Sekolah Dasar (SD) dan delapan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hingga Oktober 2026, progres pengerjaan telah mencapai 50 persen, dengan penyaluran anggaran tahap awal sebesar 70 persen langsung ke rekening masing-masing sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, La Mane, mengatakan program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kelayakan sarana pendidikan agar peserta didik dapat belajar di lingkungan yang lebih aman, bersih, dan nyaman. Pembangunan dan pemugaran masih berlangsung di sejumlah satuan pendidikan penerima program.

"Alokasi anggaran pembangunan telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah sebesar 70 persen pada tahap awal pelaksanaan. Mekanisme ini dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," kata La Mane saat diwawancarai awak media, Selasa (21/10/2026).

Menurut La Mane, pelaksanaan teknis pembangunan di lapangan menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah sebagai penerima manfaat. Sementara itu, Dinas

Lanjut ke Hal: 7

Porseni Buton Selatan Digelar November 2026 Dipusatkan di SMPN 1 Batauga, Dispora Bidik Talenta Muda Berprestasi

Laporan: Ardi



BUTON SELATAN, BP-Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Buton Selatan menyiapkan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) 2026 sebagai wadah penjaringan bakat pelajar di bidang olahraga dan seni. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 9â€“13 November 2026 itu akan dipusatkan di SMP Negeri 1 Batauga.

Persiapan kegiatan dimatangkan melalui rapat pembentukan panitia di Kantor Dispora Buton Selatan, Selasa (20/10/2026). Rapat yang dihadiri kepala sekolah atau perwakilannya tersebut membahas susunan kepanitiaan dan penentuan juri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lomba.

Kepala Dispora Buton Selatan,

Lanjut ke Hal: 7

Dicari Prabowo di Rakornas, KDM Pilih Padamkan Karhutla Ciremai dengan 1.000 Personel



Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BGP- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, sehingga tidak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ketidakhadirannya sempat menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menanyakan keberadaannya di hadapan para kepala daerah.

Dedi, yang dikenal dengan sapaan KDM, menjelaskan bahwa penanganan kebakaran Ciremai menjadi prioritas yang harus ditangani langsung di lapangan. Ia menyebut keputusan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan mengaku telah melaporkan ketidakhadirannya kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Saya sampaikan bahwa penanganan kebakaran Ciremai itu merupakan fokus prioritas yang disarankan oleh Pak Mensesneg. Saya juga sudah lapor ke Pak Seskab," ujar Dedi melalui akun media sosialnya.

Sebelumnya, saat memberikan pengarahan dalam Rakornas TPAKD, Prabowo sempat mencari gubernur yang memimpin Provinsi Jawa Barat tersebut. "Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk," kata Prabowo ketika menyapa peserta kegiatan.

Di lokasi kebakaran, Dedi menyampaikan bahwa kobaran api di kawasan Gunung Ciremai telah berhasil diisolasi agar tidak meluas ke wilayah sekitarnya. Meski demikian, upaya pemadaman terus dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam, terutama di kawasan dengan medan terjal yang menyulitkan petugas menjangkau titik kebakaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk mendukung operasi pemadaman melalui udara. Dedi menyebut tiga helikopter direncanakan dikerahkan, masing-masing satu unit menuju Kertajati dan dua unit menuju Pangkalan Sukani di Majalengka, setelah diberangkatkan dari Bogor.

"Hari ini heli akan segera turun dari Bogor, satu ke Kertajati, dua ke Pangkalan Sukani Majalengka. Dari situ heli akan menggunakan water bombing melakukan penanganan kebakaran agar apinya padam dan tidak lagi menjalar ke berbagai tempat," kata Dedi.

Selain dukungan udara, sebanyak 1.000 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan masyarakat dikerahkan untuk memperkuat penanganan di darat. Mereka bertugas mengoptimalkan sekatan api dan memfungsikan kanal alami di lereng gunung untuk membantu mengendalikan pergerakan kebakaran.

Dedi berharap pengoptimalan kanal alami dapat memperkuat pencegahan apabila kebakaran kembali terjadi. Ia juga mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas yang berpotensi memicu karhutla dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Penanganan kebakaran Ciremai berlangsung dalam konteks persoalan karhutla yang berulang di Indonesia, terutama ketika vegetasi mengering pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 1997- 1998, misalnya, menjadi salah satu krisis lingkungan besar yang dampaknya meluas hingga negara-negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.

Persoalan serupa juga terjadi di berbagai negara. Kebakaran hutan di Australia pada 2019-2020 dan kebakaran besar di Kanada pada 2023 menunjukkan bahwa cuaca panas, kekeringan, kondisi vegetasi, serta faktor aktivitas manusia dapat memperbesar risiko kebakaran dan menyulitkan pemadaman. Pengalaman tersebut menegaskan pentingnya deteksi dini, kesiapan personel, koordinasi lintas lembaga, serta perlindungan kawasan hutan.

Dedi menutup imbauannya dengan mengajak masyarakat menjaga alam sebagai bagian dari upaya melindungi kehidupan manusia. "Karena kita adalah bagian dari alam, alam tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan alam,"tuturnya.(*)

Revisi UU Pemilu, DPR Wacanakan Penambahan Komisioner KPU dan Bawaslu



Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) membuka wacana penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah. Usulan tersebut mengemuka setelah evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 menunjukkan kompleksitas persoalan yang harus ditangani penyelenggara dan pengawas pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengatakan jumlah komisioner KPU RI yang saat ini tujuh orang diwacanakan menjadi sembilan orang. Sementara itu, jumlah komisioner Bawaslu RI yang saat ini lima orang diusulkan bertambah menjadi tujuh orang.

"Iya, rencana nambah, misalnya [komisioner KPU] RI rencana tujuh jadi sembilan, kayak gitu. Sekarang misalnya, Bawaslu dari lima menjadi tujuh," kata Irawan saat dihubungi pada Jumat (23/10/2026).

Menurut Irawan, penambahan tersebut dipertimbangkan untuk menyesuaikan kapasitas kelembagaan dengan beban kerja penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Wilayah yang luas, jumlah pemilih yang besar, serta persoalan teknis dan hukum yang kompleks menjadi sejumlah faktor yang mendasari evaluasi tersebut.

"Jadi, tetap lebih kepada kompleksitas dan penyesuaian kebutuhan aja. Jadi, asesmennya itu berdasarkan kebutuhan," ujarnya.

Wacana itu tidak hanya menyasar KPU dan Bawaslu di tingkat pusat. Penyesuaian jumlah komisioner di tingkat provinsi serta kabupaten/kota juga menjadi bagian dari pembahasan. Besaran penambahan nantinya dipertimbangkan berdasarkan jumlah pemilih dan tingkat kompleksitas penyelenggaraan pemilu di setiap wilayah.

Irawan menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan adalah beban komisioner pusat ketika harus menangani persoalan pemilu di daerah. Dalam kondisi tertentu, komisioner KPU dan Bawaslu di Jakarta harus turun langsung untuk menyelesaikan masalah di wilayah, sementara pada saat bersamaan mereka tetap memiliki tanggung jawab lain di tingkat nasional.

"Karena sering kali ketika komisioner KPU RI, Bawaslu RI harus menyelesaikan masalah-masalah di daerah, itu kadang kala komisionernya di Jakarta itu kosong," kata Irawan.

Selain menangani persoalan daerah, komisioner juga harus mengurusi berbagai sengketa pemilu. Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penambahan personel. Meski demikian, Irawan menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final DPR bersama pemerintah.

Wacana penambahan komisioner merupakan bagian dari penyusunan naskah akademik RUU Pemilu, termasuk melalui kajian sosiologis yang bertolak dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024. Evaluasi itu diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan desain kelembagaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemilu mendatang.

Dalam sejarah pemilu Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum terus mengalami perubahan dari sisi kelembagaan maupun mekanisme. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, sedangkan pembentukan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri diperkuat melalui kerangka hukum reformasi. Bawaslu kemudian berkembang sebagai lembaga pengawas pemilu untuk memperkuat pengawasan terhadap proses demokrasi.

Pada tingkat internasional, pengelolaan pemilu juga menunjukkan beragam model kelembagaan. Sejumlah negara menggunakan komisi pemilu independen, sedangkan negara lain menempatkan sebagian tanggung jawab penyelenggaraan pemilu pada lembaga pemerintahan. Perbedaan model tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan perlu disesuaikan dengan sistem politik, kondisi geografis, serta kebutuhan pengawasan masing-masing negara.

Di sisi lain, revisi UU Pemilu juga harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu, sebagaimana diberitakan Transparency International Indonesia (TII), mengingatkan bahwa pelaksanaan putusan MK merupakan kewajiban konstitusional yang perlu ditindaklanjuti dalam proses legislasi.

Koalisi tersebut mendorong Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu menginventarisasi putusan MK yang relevan beserta matriks pelaksanaannya. Beberapa putusan yang disorot meliputi Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden, serta Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan ketentuan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

Koalisi masyarakat sipil juga menekankan pentingnya penyusunan norma yang sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum MK, disertai ketentuan transisi yang menjamin kesinambungan pemerintahan, periodisasi pemilu, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penambahan komisioner KPU dan Bawaslu masih menjadi salah satu gagasan dalam pembahasan RUU Pemilu, di tengah kebutuhan pembenahan kelembagaan dan penyesuaian aturan pemilu berdasarkan putusan konstitusional.(*)

GPM Sultra Tembus 252 Kali, Penyaluran Beras SPHP Lampaui Target Nasional



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat 252 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang 2026. Program tersebut diperkuat melalui kegiatan serentak di 18 titik dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

Capaian lain terlihat pada penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sultra tercatat berada di peringkat pertama nasional dengan realisasi mencapai 160,98 persen dari target penyaluran. Angka tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan program stabilisasi pangan di daerah.

GPM serentak digelar pada Kamis (22/10/2026), dengan lokasi utama di Terminal Dapu-Dapura, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota lainnya juga melaksanakan kegiatan serupa sehingga total pelaksanaan pada momentum tersebut mencapai 18 titik.

Kegiatan di Kendari diawali dengan mengikuti agenda Kementerian Pertanian RI secara virtual yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, distributor, serta pelaku usaha pangan turut menghadiri kegiatan tersebut.

Usai mengikuti agenda nasional, Pj. Sekda bersama para undangan meninjau stan-stan pasar murah untuk melihat langsung pelayanan dan penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan akses pangan terjangkau hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Di luar pelaksanaan serentak tersebut, jumlah GPM di Sultra sepanjang 2026 telah mencapai 252 kali. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah melalui upaya menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Sementara itu, realisasi bantuan pangan untuk periode Juli-September 2026 tercatat mencapai 97,42 persen. Pemprov Sultra menyatakan siap melanjutkan penyaluran bantuan pangan periode Oktober-Desember 2026 untuk menjaga keberlanjutan dukungan terhadap masyarakat penerima manfaat.

Pemprov Sultra juga memastikan ketersediaan dan pasokan bahan pangan pokok serta komoditas strategis di wilayahnya dalam kondisi aman. Pemerintah daerah bersama Forkopimda terus berupaya menjaga kelancaran distribusi dan kestabilan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Secara historis, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober untuk menandai berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada 1945. Gagasan peringatan ini disepakati dalam konferensi FAO pada 1979, kemudian diperingati pertama kali pada 1981. Pada 2026, FAO mengangkat tema "Innovate Today. Nourish Tomorrow" atau berinovasi hari ini untuk mencukupi pangan masa depan, dengan penekanan pada inovasi yang mendukung sistem pangan berkelanjutan.

Di Indonesia, program pangan murah menjadi bagian dari strategi pengendalian gejolak harga dan memperpendek rantai distribusi. Pada 2025, Gerakan Pangan Murah tercatat dilaksanakan sebanyak 13.321 kali di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada tahun yang sama, pelaksanaan GPM serentak di 4.337 titik pada 29 Agustus memecahkan rekor sebelumnya, yakni 362 titik pada 28 Juni 2023. Data historis tersebut menunjukkan bahwa intervensi distribusi pangan terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap bahan pokok terjangkau.

Dengan capaian GPM, penyaluran beras SPHP, dan realisasi bantuan pangan tersebut, Pemprov Sultra berupaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok di tengah tantangan pengelolaan pasokan pangan. Keberlanjutan program dan ketepatan sasaran distribusi menjadi faktor penting agar stabilitas harga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)

Sekda Kendari Tampung Aduan Mahasiswa soal Dugaan Bangunan Tanpa PBG



Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Dugaan pelanggaran garis sempadan jalan dan bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi sorotan mahasiswa dalam audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026). Mahasiswa meminta pemerintah kota menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi itu mencakup pembangunan SD Negeri 10 Kendari di Jalan Saranani serta sebuah bangunan hotel atau penginapan di Jalan Saranani, sekitar kawasan Jalan Pajak. Mahasiswa menilai kedua persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang, persyaratan teknis, dan ketentuan administrasi.

Perwakilan mahasiswa, Akmal, yang menjabat Sekretaris Umum WIKI Malaka Sutera sekaligus Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Aktif Lintas Kampus Sulawesi Tenggara, menyampaikan bahwa pengawasan pembangunan harus dilakukan secara konsisten. Menurut mahasiswa, kepatuhan terhadap regulasi diperlukan agar pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Pada pembangunan SD Negeri 10 Kendari, mahasiswa menduga terdapat persoalan terkait garis sempadan jalan dengan lebar sekitar empat meter. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan dan pencocokan dengan ketentuan teknis yang berlaku untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Mahasiswa juga meminta pemerintah memeriksa status PBG bangunan hotel atau penginapan di kawasan Jalan Saranani. Bangunan tersebut diduga belum mengantongi persetujuan yang dipersyaratkan dan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan garis sempadan jalan. Hingga informasi dalam audiensi tersebut disampaikan, belum terdapat hasil pemeriksaan yang memastikan dugaan itu sebagai pelanggaran.

Menanggapi aspirasi tersebut, Amir Hasan menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran harus ditangani dengan mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku. "Setiap dugaan pelanggaran perlu ditelaah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar penanganannya tepat dan sesuai prosedur, ujarnya.

Penanganan lebih lanjut, menurut substansi pertemuan tersebut, memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Langkah itu diperlukan untuk memeriksa kondisi faktual di lapangan, dokumen persetujuan bangunan, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan tata ruang sebelum pemerintah menentukan tindak lanjut.

Secara nasional, pengaturan bangunan gedung mengalami perubahan penting melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang ditetapkan pada 2 Februari 2021. Peraturan tersebut menjadi aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan mengatur penyelenggaraan bangunan, termasuk mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung. Regulasi itu juga mencabut PP Nomor 36 Tahun 2005.

Dalam kerangka regulasi tersebut, PBG berkaitan dengan pemenuhan standar teknis bangunan gedung, bukan sekadar kelengkapan dokumen administratif. Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa permohonan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi diproses melalui perangkat daerah teknis dan perizinan di kabupaten atau kota. Karena itu, pemeriksaan atas bangunan yang dilaporkan perlu mengacu pada dokumen dan persyaratan yang relevan.

Pada tingkat internasional, isu pengendalian tata ruang dan kepatuhan pembangunan juga menjadi bagian dari agenda perkotaan berkelanjutan. Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, pada 20 Oktober 2016 mengadopsi New Urban Agenda, yang mendorong perencanaan kota, regulasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Agenda tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik.

Melalui audiensi tersebut, mahasiswa berharap Pemerintah Kota Kendari memperkuat pengawasan tata ruang dan bangunan, sekaligus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Pemeriksaan yang berbasis bukti diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran sekaligus menjaga agar pembangunan di Kota Kendari berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.(*)

Hari Santri 2026, Wabup Buton Tengah Siapkan Santri Hadapi Tantangan Indonesia Emas





Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Santri didorong tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memperkuat kemampuan teknologi, inovasi, dan kemandirian ekonomi untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut mengemuka dalam upacara puncak Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Kabupaten Buton Tengah di halaman Pondok Pesantren Al Munawwarah, Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kamis (22/10/2026).

Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., memimpin upacara sebagai inspektur sekaligus membacakan sambutan Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, pimpinan pondok pesantren, organisasi keagamaan, serta santri, santriwati, siswa, dan siswi se-Kabupaten Buton Tengah.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas". Tema tersebut menempatkan santri sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan, berintegritas, dan berakhlak mulia.

Dalam sambutan yang dibacakan Adam Basan, Hari Santri disebut sebagai momentum untuk meneladani perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan itu diharapkan tetap hidup melalui kontribusi nyata di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan teknologi.

Salah satu peristiwa penting yang melandasi peringatan Hari Santri ialah Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan tersebut menjadi bagian penting dari mobilisasi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan, menjelang pertempuran besar di Surabaya pada November 1945.

Secara historis, pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 memperlihatkan besarnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan dan menjadi salah satu penanda kuat perjuangan rakyat Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Dalam konteks masa kini, perjuangan santri dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. Penguasaan ilmu agama perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan berpikir kritis, serta inovasi agar lulusan pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Pesantren juga diharapkan memperkuat tiga fungsi utamanya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiganya menjadi landasan bagi pesantren untuk mencetak generasi berkarakter sekaligus memperluas kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain menjadi penjaga nilai keagamaan, santri diharapkan mengambil peran sebagai pelopor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penjaga persatuan dan kerukunan, serta penggerak kemandirian ekonomi. Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari tanggung jawab generasi muda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Semangat man jadda wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, menjadi pengingat bagi para santri agar tidak berhenti belajar, berinovasi, dan berkarya. Nilai tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk membangun daya saing tanpa meninggalkan akhlak dan identitas keagamaan.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, Kabupaten Buton Tengah menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan masa depan. Santri diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan berkualitas, penguasaan teknologi, penguatan persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.(*)

Wabup Buton Syarifudin Saafa Dorong ASN Siapkan Masa Pensiun, Taspen Kenalkan Layanan



Laporan:La Harman

BUTON,BP- Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi masa purnatugas melalui sosialisasi layanan ketaspenan dan produk jasa perbankan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, S.T., mewakili bupati, tersebut bertujuan memastikan ASN memahami hak pensiun sekaligus memiliki rencana untuk tetap produktif setelah mengakhiri masa pengabdian.

Sosialisasi itu menghadirkan Branch Manager PT Taspen Cabang Kendari, Ilmiah Rizki, dan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Kendari, Muh. Irwan, sebagai narasumber. Pesertanya mencakup sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang memasuki masa pra-pensiun, dengan dukungan jajaran pemerintah daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Drs. La Ode Muhidin Mahmud, serta Sekretaris BKPSDM, Jusmin, S.IP.

Syarifudin mengatakan, persiapan pensiun tidak cukup hanya menyangkut penyelesaian administrasi kepegawaian. ASN juga perlu memahami hak dan kewajiban, menyiapkan dokumen persyaratan, serta merencanakan aktivitas yang dapat menopang kesejahteraan setelah tidak lagi menerima penghasilan dari pekerjaan aktif.

"Dalam memasuki masa pra-pensiun, wajib mengetahui apa saja data dan kelengkapan yang harus disiapkan. Apa saja hak dan kewajiban kita saat pensiun nanti serta bagaimana kita mengisi masa pensiun agar tetap produktif," ujar Syarifudin.

Menurut dia, masa purnatugas perlu diisi dengan kegiatan yang menjaga kesehatan, semangat, dan produktivitas. Wirausaha menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan dan minat masing-masing ASN. Pemerintah Kabupaten Buton juga memiliki mitra pelayanan melalui PT Bank Mandiri Taspen untuk membantu kebutuhan para calon pensiunan hingga memasuki masa pensiun.

Ilmiah Rizki menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan Taspen kepada peserta sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama pengelola kepegawaian dan keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar hak peserta dapat diproses dan disalurkan secara tepat, cepat, serta mudah diakses.

"Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan tugas mewujudkan program jaminan sosial, khususnya bagi aparatur sipil negara dan pimpinan daerah," kata Ilmiah.

Ia memaparkan empat program utama Taspen, yakni Tabungan Hari Tua (THT) dengan iuran 3,25 persen setiap bulan, program pensiun dengan iuran 4,75 persen setiap bulan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk melindungi peserta dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, serta Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja. Ketentuan manfaat dan kepesertaan mengikuti regulasi program yang berlaku.

Layanan digital juga menjadi bagian dari materi sosialisasi. Melalui aplikasi Andal by Taspen, peserta dapat memeriksa kartu kepesertaan, memperkirakan manfaat, melacak klaim, melakukan autentikasi bulanan, dan mengelola dokumen mandiri. Taspen Online Services (TOS) menyediakan layanan daring, antara lain E-SPTB, E-SPT Pajak Pensiun, dan e-klaim. Sementara itu, Taspen-Care (T-Care) berfungsi sebagai kanal pengaduan dan bantuan bagi peserta.

Secara historis, perlindungan bagi pegawai negeri menjelang masa pensiun telah dirintis pemerintah sejak Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri pada 25-26 Juli 1960. Pemerintah kemudian mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen) pada 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Pada 1 April 1990, Taspen mulai menyelenggarakan pembayaran pensiun PNS secara nasional. Pada 2015, perusahaan tersebut juga mendapat amanat untuk mengelola program JKK dan JKM bagi ASN dan pejabat negara.

Dalam konteks internasional, perlindungan hari tua menjadi bagian penting dari perkembangan sistem jaminan sosial modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948 mengakui hak atas jaminan sosial melalui Pasal 22. Selanjutnya, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) Nomor 102 pada 1952. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan keamanan ekonomi masyarakat, termasuk ketika memasuki usia lanjut.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap ASN dapat mempersiapkan masa pensiun secara lebih terencana, baik dari sisi administrasi, pemahaman manfaat jaminan sosial, maupun kegiatan ekonomi setelah purnatugas. Pemahaman terhadap layanan dan kanal digital Taspen juga diharapkan membantu peserta mengurus kebutuhan administrasi dengan lebih efektif.(*)

Menkes Minta Kelompok Rentan Hindari Kabut Asap, Puskesmas Siapkan Obat



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau bayi, balita, lanjut usia (lansia), dan ibu hamil membatasi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih berlangsung. Imbauan pada Kamis (15/10/2026) itu ditujukan untuk mengurangi paparan partikel asap yang berisiko mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.

Kementerian Kesehatan menyiapkan obat-obatan di puskesmas wilayah terdampak untuk membantu menangani gangguan kesehatan akibat paparan asap. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, peningkatan kewaspadaan, dan pelayanan medis bagi masyarakat yang mengalami keluhan.

"Pesan saya, terutama untuk kelompok rentan, jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keluar, sebisa mungkin biarkan anggota keluarga yang tidak rentan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Budi saat memberikan keterangan kepada media di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah, Menkes menganjurkan penggunaan masker, terutama N95 jika tersedia. Warga juga disarankan memakai kacamata untuk melindungi mata dan pakaian berlengan panjang guna mengurangi paparan partikel asap pada kulit.

Masyarakat perlu membersihkan diri setelah kembali dari luar rumah serta memperhatikan gejala yang muncul. Batuk, iritasi mata, dan kulit gatal atau mengalami iritasi berkepanjangan merupakan keluhan yang tidak boleh diabaikan, terutama apabila terus berlangsung atau semakin parah.

"Jangan menunggu sampai batuk darah. Kalau mulai batuk, mata mengalami iritasi, atau kulit terus-menerus gatal dan iritasi, segera periksa ke puskesmas terdekat," tegas Budi.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan persoalan baru di Indonesia. Pada 2015, kebakaran besar di Sumatra dan Kalimantan menyebabkan pencemaran udara serius, mengganggu aktivitas masyarakat, serta memicu kekhawatiran terhadap kesehatan penduduk di wilayah terdampak.

Dampak kebakaran tersebut juga melintasi batas negara. Singapura dan Malaysia turut mengalami pencemaran udara akibat asap dari kebakaran di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa itu menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang menjadi persoalan kesehatan lintas negara yang memerlukan kerja sama regional.

Secara medis, paparan asap dapat mengiritasi mata dan saluran pernapasan. Partikel halus yang terkandung dalam asap juga berpotensi masuk jauh ke paru-paru. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan, perlu memberikan perhatian khusus terhadap kualitas udara dan mengurangi paparan ketika kondisi memburuk.

Budi menegaskan, Kementerian Kesehatan tidak dapat menghentikan sumber asap secara langsung, tetapi berupaya mengurangi dampak kesehatannya melalui kesiapan layanan kesehatan dan edukasi kepada masyarakat. Pembatasan aktivitas di luar rumah, penggunaan pelindung saat terpaksa keluar, serta pemeriksaan dini ketika muncul gejala menjadi langkah penting selama kabut asap masih berlangsung.(*)

Kemenkes Perluas Skrining Mata, 1,6 Juta Orang Terindikasi Gangguan Penglihatan



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat deteksi dini gangguan penglihatan setelah sekitar 1,6 juta orang terindikasi mengalami masalah penglihatan dari 34 juta orang yang menjalani pemeriksaan mata melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Upaya ini dilakukan untuk memperluas pencegahan kebutaan dan mendekatkan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat.

Penguatan program tersebut ditandai dengan peluncuran *Comprehensive Community Eye Care* (CCEC) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2026. Program ini mengintegrasikan pemeriksaan, edukasi, dan penanganan gangguan penglihatan melalui sekolah serta fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemeriksaan mata perlu menjadi bagian dari kebiasaan menjaga kesehatan sejak dini. Menurut dia, gangguan penglihatan tidak boleh diabaikan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Jangan tunggu sampai mata kita terasa berat, kabur, atau menyakitkan. Jagalah organ pertama yang bekerja untuk kita setiap hari," ujar Dante.

Secara global, sekitar 1,1 miliar orang diperkirakan mengalami gangguan penglihatan yang belum tertangani. Sekitar 90 persen kasus tersebut dapat dicegah atau diobati. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan berkala, akses terhadap layanan kesehatan mata, serta penanganan yang tepat sejak gangguan pertama kali ditemukan.

Kemenkes menempuh empat langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kesehatan mata, yakni meningkatkan skrining melalui CKG, memperluas akses operasi katarak, memeratakan ketersediaan dokter spesialis mata, serta meningkatkan edukasi di sekolah dan tempat kerja. Kemenkes juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) guna mengatasi ketimpangan layanan operasi katarak antardaerah.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pengembangan vision center menjadi salah satu cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Model ini menghubungkan Puskesmas, dinas kesehatan, organisasi profesi, kader kesehatan, dan mitra pembangunan untuk mempermudah akses pemeriksaan, dukungan tenaga profesional, serta penyediaan kacamata.

Selama ini, sebagian besar pelayanan kesehatan mata dilakukan di rumah sakit sehingga masyarakat di sejumlah wilayah harus menempuh perjalanan untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan. Melalui pengembangan vision center, layanan tersebut diharapkan dapat diperluas hingga tingkat Puskesmas agar masyarakat memperoleh pertolongan lebih awal.

Dalam tiga tahun ke depan, CCEC menargetkan skrining terhadap lebih dari 60.000 siswa dan pekerja di lima provinsi serta 19 kabupaten/kota. Program ini juga menargetkan pelatihan bagi lebih dari 2.000 tenaga kesehatan dan guru, dukungan terhadap 16.500 operasi katarak, distribusi lebih dari 100.000 kacamata, pembangunan 13 vision center baru, serta penguatan 21 pusat layanan yang telah tersedia.

Chief of Programs & Partnership The Fred Hollows Foundation, Amanda Huang, menjelaskan bahwa CCEC merupakan kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperluas layanan kesehatan mata berbasis masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, pemeriksaan dan penanganan diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih awal, termasuk melalui sekolah dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pentingnya skrining mata juga terlihat dari pengalaman Fayra Salsabila, siswi SMP Negeri 145 Jakarta, yang mengikuti pemeriksaan dalam kegiatan peluncuran program. Hasil pemeriksaan menunjukkan silinder 2,00 pada salah satu matanya dan 1,50 pada mata lainnya. Fayra memperoleh kacamata gratis serta edukasi tentang kebiasaan yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan mata.

"Aku dapat kacamata gratis dari pemeriksaan ini. Nanti aku tinggal cek lagi untuk pilih model kacamata yang diinginkan di optik," ujar Fayra.

Untuk menjaga kesehatan mata, Dante mengimbau masyarakat menerapkan aturan 20-20-20 ketika menggunakan perangkat digital: setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar enam meter. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2026 mengusung tema nasional 'Skrining Mata: Langkah Kecil untuk Manfaat Besar' dan tema global Love Your Eyes. Melalui pemeriksaan berkala, edukasi, dan perluasan layanan, pemerintah mendorong masyarakat mengenali gangguan penglihatan sedini mungkin.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

DPR Desak Bea Cukai dan Polda Bongkar Jaringan Obat Ilegal hingga Pemodal



Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membongkar dua pabrik obat keras ilegal jenis Tramadol dan Triheksifenidil di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya mengusut jaringan peredaran obat keras ilegal hingga ke bandar, pemodal, dan aliran dana. Desakan itu menyusul pengungkapan 7.862.500 butir tramadol dan triheksifenidil ilegal, serta bahan baku seberat 69.272,5 kilogram yang diperkirakan dapat menghasilkan 492 juta butir obat.

Pengungkapan tersebut dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta. Barang yang diduga terkait dengan peredaran gelap obat keras itu berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Besarnya barang bukti dinilai perlu diikuti pengembangan perkara untuk mengungkap keseluruhan jaringan.

Abdullah menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada produsen, kurir, dan pengedar. Aparat perlu menelusuri pihak yang mendanai kegiatan ilegal, mengendalikan distribusi, serta memperoleh keuntungan dari peredaran tersebut agar rantai kejahatan dapat diputus.

"Harus juga ditelusuri jaringannya hingga ke pemodal dan aliran uang, agar seluruh rantai kejahatan dapat diungkap dan diputus," kata Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Ia juga meminta Bea Cukai meningkatkan pengawasan, kemampuan intelijen, patroli, dan penindakan dengan dukungan sumber daya manusia serta teknologi yang memadai. Menurutnya, kolaborasi kedua institusi diperlukan untuk mengungkap tindak pidana narkotika sekaligus peredaran obat keras ilegal.

"Kolaborasi dan sinergi Kanwil Bea Cukai Jakarta dengan Polda Metro Jaya harus terus diperkuat untuk mengungkap berbagai kejahatan, bukan hanya produksi dan peredaran obat keras ilegal, tetapi juga narkotika," ujarnya.

Dalam pembagian tugasnya, Bea Cukai berperan mengawasi lalu lintas barang, termasuk melalui pelabuhan, bandara, dan jalur pengiriman internasional. Sementara itu, kepolisian menindaklanjuti temuan melalui penyelidikan dan pengembangan perkara. Abdullah menilai, pengawasan dan penindakan yang efektif dapat menekan peredaran obat ilegal serta mengurangi potensi kerugian negara akibat biaya penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT), Henry Yosodiningrat, turut mengapresiasi kerja sama Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya. Ia menilai sinergi lintas institusi penting untuk menghadapi kejahatan narkotika yang semakin terorganisasi dan dapat melibatkan jaringan lintas negara.

Henry mengingatkan, keberhasilan pemberantasan tidak cukup diukur dari jumlah barang bukti yang disita atau tersangka yang ditangkap. Aparat harus berupaya mengungkap jaringan secara menyeluruh, mulai dari kurir dan pengedar hingga bandar besar, pemodal, pengendali distribusi, serta pihak yang memberikan perlindungan apabila terbukti terlibat.

Pemberantasan narkoba di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pemerintah mulai mengoordinasikan penanganan masalah tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, yang kemudian diikuti pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional pada 1999. Lembaga tersebut berkembang menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2002, sebelum penguatan kerangka hukum berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di tingkat internasional, perdagangan narkoba juga menjadi perhatian karena menghasilkan keuntungan besar bagi kelompok kejahatan terorganisasi. World Drug Report 2025 yang diterbitkan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menjelaskan bahwa perdagangan narkoba menghasilkan pendapatan global hingga ratusan miliar dolar AS per tahun berdasarkan berbagai estimasi. Laporan itu juga menyoroti peran jaringan terorganisasi dalam rantai perdagangan, sehingga pelacakan keuntungan dan aliran dana menjadi bagian penting dalam pemberantasan kejahatan tersebut.

Abdullah mendorong agar pengembangan perkara di Jakarta tidak berhenti pada penyitaan barang bukti. Penelusuran jalur distribusi, sumber pendanaan, dan pihak yang diduga mengendalikan peredaran diharapkan dapat membantu aparat mengungkap jaringan secara menyeluruh. Namun, keterlibatan setiap pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. (*)

Polisi Bongkar Dugaan Pabrik Narkotika Cair di Maros, Lima Pria Ditahan



Satresnarkoba Polres Maros membongkar industri rumahan yang diduga membuat narkotika cairan sintetis.

Laporan: Amran

MAROS, BP- Lima pria ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Maros setelah polisi mengungkap dugaan industri rumahan narkotika sintetis berbentuk cair di sebuah kamar kos di Dusun Baddo-baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari lokasi tersebut, petugas menyita bahan kimia, puluhan botol berisi cairan yang diduga mengandung narkotika, serta peralatan yang disinyalir digunakan untuk meracik bahan terlarang.

Kasat Narkoba Polres Maros, Iptu Asri Arif, membenarkan penangkapan tersebut. "Iya, ada lima orang diduga terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika ditangkap," ujar Asri dalam keterangannya yang dikutip Jumat (23/10/2026).

Dalam penggeledahan, polisi menemukan bahan campuran, alkohol, cairan pelarut, alat ukur, mixer elektrik, dan timbangan digital. Petugas juga menyita sedikitnya 150 botol kaca kosong yang diduga disiapkan untuk menunjang proses produksi. Selain itu, puluhan botol berisi cairan yang diduga mengandung narkotika sintetis turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kelima terduga pelaku diduga bertugas menyiapkan paket narkotika dan menempatkannya di sejumlah titik tertentu untuk diedarkan. Polisi belum memerinci asal bahan baku, jumlah produksi, nilai transaksi, maupun kemungkinan adanya jaringan pemasok dan pengendali di balik aktivitas tersebut.

Asri mengatakan, kelima pria itu telah ditahan di Satuan Reserse Narkoba Polres Maros bersama barang bukti. Mereka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses hukum selanjutnya akan mendalami dugaan peran masing-masing orang dalam produksi dan peredaran narkotika tersebut.

Pengungkapan kasus ini berlangsung di tengah upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Secara historis, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada 12 Oktober 2009 sebagai salah satu landasan hukum penindakan terhadap kejahatan narkotika. Sementara itu, di tingkat internasional, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika diadopsi pada 19 Desember 1988 untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menghadapi perdagangan narkotika ilegal.

Meski lima orang telah ditangkap, pengungkapan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan seluruh dugaan pidana yang disangkakan. Identitas zat dalam cairan yang disita dan keterlibatan setiap terduga pelaku tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan barang bukti dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)

Penertiban Ternak di Buton Selatan Terhambat Perda, PPNS dan Kendaraan Operasional

gani berita acara kesanggupan untuk tidak menggembalakan hewan di kawasan tersebut. Nurunani menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026).

Menurut Nurunani, penangkapan sapi memiliki risiko lebih besar dibandingkan penanganan ternak berukuran kecil. Selain berpotensi mencederai petugas, tindakan di lapangan juga dapat memicu konflik dengan pemilik hewan. Karena itu, ia menilai penertiban membutuhkan prosedur yang jelas dan dukungan operasional yang memadai.

"Kalau kambing mungkin mudah kita angkat, tapi sapi berbeda. Saat penangkapan terjadi, jika ada anggota yang terluka, siapa yang menanggung risikonya? Saya tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," ujarnya.

Kendala lain terletak pada peraturan daerah (Perda) yang dinilai belum memberikan dasar penindakan secara tegas. Aturan yang berlaku mengatur kewajiban pemilik mengikat ternak di tempat yang ditentukan dan mengawasi hewannya, tetapi ketentuan sanksi terhadap pelanggaran dinilai belum jelas. Nurunani juga mempertanyakan dasar hukum untuk menahan atau melelang ternak yang tidak diketahui pemiliknya.

"Pertanyaannya adalah apakah Perda kita mengizinkan hal itu. Ternyata aturannya belum cukup kuat untuk penindakan," katanya.

Satpol PP Buton Selatan saat ini juga belum memiliki PPNS setelah pejabat yang sebelumnya bertugas berpindah ke instansi lain. Ketiadaan penyidik tersebut membatasi kemampuan instansi dalam menjalankan proses penegakan Perda sesuai ketentuan hukum. Selain itu, kendaraan operasional untuk mendukung penertiban juga belum tersedia. Usulan pelatihan dan pengangkatan PPNS baru direncanakan melalui anggaran 2027.

Secara historis, penertiban ternak merupakan bagian dari tantangan pengelolaan ketertiban umum di berbagai daerah. Di Indonesia, kerangka umum tugas Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tingkat internasional, pengendalian hewan ternak di ruang publik juga berkaitan dengan tata kelola perkotaan, keselamatan pengguna jalan, kebersihan lingkungan, serta tanggung jawab pemilik hewan. Namun, penerapannya bergantung pada peraturan dan mekanisme penegakan hukum masing-masing wilayah.

Nurunani berharap Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperkuat regulasi, memenuhi kebutuhan tenaga penyidik, dan menyediakan sarana operasional agar penertiban dapat dilakukan secara efektif, aman, serta berkeadilan. Koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan perangkat daerah terkait, termasuk Bidang Peternakan, akan menjadi bagian dari upaya mencari penyelesaian yang berkelanjutan. (*)

Porseni Buton Selatan Digelar November 2026 Dipusatkan di SMPN 1 Batauga, Dispora Bidik Talenta Muda Berprestasi

S.Pd., M.M.Pd., mengatakan Porseni memiliki peran strategis untuk menemukan potensi generasi muda yang dapat dikembangkan melalui pembinaan berkelanjutan. Menurut dia, ajang tersebut harus diarahkan pada tujuan utama, yakni melahirkan talenta daerah yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi.

"Kami berharap Porseni kembali pada eksistensi tujuannya, yaitu menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya dapat dikembangkan hingga ke tingkat Kabupaten Buton Selatan, dan mampu mengantarkan mereka berprestasi hingga ke tingkat Provinsi maupun Nasional," ujar La Salimu.

Selain menjaring calon atlet dan pelaku seni, Porseni diharapkan memperkuat persatuan serta membangun kebersamaan antarsekolah di Kabupaten Buton Selatan. Interaksi melalui kompetisi yang sehat juga menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan minat, bakat, disiplin, dan sportivitas.

"Tujuan utama Porseni adalah menumbuhkan persatuan, bakat, minat, dan kebersamaan antarsekolah di Kabupaten Buton Selatan," kata La Salimu.

Rapat teknis pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada 5 November 2026, sebelum kegiatan utama digelar selama lima hari. Salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan ialah bola voli kategori putra dan putri. Rincian cabang seni serta jadwal pertandingan lainnya belum disebutkan dalam informasi yang tersedia.

Secara historis, olahraga pelajar telah menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet di Indonesia. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), yang pertama kali diselenggarakan pada 1989, menjadi salah satu contoh wadah kompetisi untuk mengembangkan kemampuan atlet usia sekolah. Di tingkat internasional, Olimpiade juga menempatkan pembinaan atlet muda sebagai bagian penting dari keberlanjutan prestasi olahraga. Dalam konteks daerah, Porseni Buton Selatan diharapkan menjadi salah satu pintu awal untuk mengenali potensi pelajar dan mengarahkannya menuju pembinaan yang lebih terstruktur.

Melalui Porseni 2026, Dispora Buton Selatan berharap kompetisi antarpelajar tidak berhenti pada perolehan juara, tetapi berlanjut pada pembinaan bakat dan penguatan karakter. Dengan persiapan panitia, juri, dan sekolah peserta, kegiatan ini diharapkan memberi ruang bagi lahirnya atlet serta pelaku seni berprestasi dari Buton Selatan.(*)

Berawal dari Teriakan Nama, Dada Kiri Ditikam Senjata Tajam, Rizki Tewas Lima Menit Setelah Tiba di RSUD Baubau

dekat jantung.

"Korban berteriak dan berlari kembali ke arah toko, sementara tersangka melarikan diri menggunakan motornya," kata Zabar dalam konferensi pers di Baubau, Rabu siang.

Korban kemudian dibantu Arnol untuk mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit Palagimata. Meski masih bernapas ketika tiba di rumah sakit, sekitar lima menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka di Jalan Yusti Sari, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro.

Wakapolres Baubau Kompol Andi Usri, didampingi Kasi Humas Iptu Rino Asnan, Ipda Zabar Sam, Camat Batupoaro Muh. Ikbal Djalaluddin, dan Lurah Nganganaumala La Ode Al Aswad Ampo, menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam konferensi pers. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk melengkapi berkas perkara dan mendalami rangkaian kejadian.

Atas perbuatannya, GL disangkakan melanggar Pasal 458 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polisi juga mencantumkan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai pasal subsider, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penerapan pasal tersebut perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku dan status hukum perkara.

Kasus ini kembali menyoroti risiko kekerasan yang berawal dari persoalan interpersonal. Dalam konteks nasional, penanganan tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh diatur dalam hukum pidana Indonesia, sementara secara internasional, pencegahan kekerasan interpersonal menjadi bagian dari agenda kesehatan masyarakat yang didorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, motif dalam perkara Baubau ini masih harus dipahami berdasarkan hasil penyidikan, dan dugaan pemicu berupa teriakan nama belum dapat dijadikan kesimpulan hukum sebelum proses peradilan.(*)

Revitalisasi 17 Sekolah di Baubau Capai 50 Persen untuk Sembilan SD dan Delapan SMP, Pemkot Perkuat Pengawasan, Dana Cair 70 Persen

nas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau menjalankan fungsi pemantauan, pengawasan, serta evaluasi untuk memastikan perkembangan pekerjaan tercatat secara berkala.

"Tugas kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebatas melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi perkembangan pembangunan yang kemudian dirangkum menjadi bahan laporan berkala," ujarnya.

Secara historis, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan merupakan bagian dari agenda pembangunan pendidikan di Indonesia sejak diberlakukannya program wajib belajar dan penguatan standar nasional pendidikan. Pemerintah juga menetapkan standar sarana dan prasarana sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yang mengatur ketentuan fasilitas untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Di tingkat internasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 menempatkan pendidikan berkualitas sebagai Tujuan 4, termasuk pentingnya fasilitas belajar yang aman dan inklusif.

Dalam konteks tersebut, revitalisasi sekolah di Baubau menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi fisik fasilitas pendidikan agar mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh persentase penyelesaian pembangunan, tetapi juga oleh mutu pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan keberlanjutan pemeliharaan gedung setelah proyek selesai.

Pemkot Baubau berharap pengerjaan seluruh 17 gedung sekolah dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik. (*)

Festival Burangasi 2026 Bidik Kalender Event Nasional, Angkat Warisan Budaya Leluhur ari Pangibi dan Manggaru,

Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, itu menjadi salah satu upaya memperluas promosi budaya lokal sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi leluhur.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan, Maderuddin, S.Pd., M.M., mengatakan konsistensi penyelenggaraan setiap tahun menjadi modal penting untuk mengusulkan festival tersebut sebagai agenda nasional. Menurut dia, pengakuan di tingkat nasional dapat memperluas jangkauan promosi budaya Burangasi dan meningkatkan perhatian terhadap potensi pariwisata daerah.

"Kegiatan ini telah berjalan rutin setiap tahun, sehingga memudahkan untuk diusulkan menjadi event nasional. Karena itu, kami mengundang Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wali Kota, serta para Bupati untuk hadir menyaksikan langsung kebudayaan kita," ujar Maderuddin saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026).

Berbeda dari penyelenggaraan yang sepenuhnya ditangani pemerintah kabupaten, festival tahun ini berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berperan mendampingi pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama delapan hari tersebut.

Festival ini menampilkan beragam kesenian tradisional, termasuk Tari Pangibi dan Tari Manggaru, yang menjadi bagian dari kekayaan budaya etnis Burangasi. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi identitas masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis kebudayaan.

Komunitas Burangasi tersebar di Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton, khususnya Kecamatan Lasalimu dan Pasarwajo. Pertemuan warga dari berbagai wilayah dalam festival ini menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarkomunitas sekaligus meneruskan pengetahuan budaya kepada generasi muda.

Secara historis, pelestarian budaya daerah merupakan bagian penting dari keberagaman Indonesia. Pengakuan terhadap warisan budaya juga berkembang di tingkat internasional melalui Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda, yang menekankan pentingnya menjaga tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, dan praktik budaya yang diwariskan antargenerasi. Dalam konteks itu, festival daerah dapat menjadi salah satu sarana memperkenalkan tradisi lokal, meskipun penyelenggaraan festival tidak otomatis menjadikan suatu tradisi terdaftar sebagai warisan budaya UNESCO.

Maderuddin berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat peluang Festival Budaya Burangasi masuk ke dalam Kalender Event Nasional. Dengan penyelenggaraan yang konsisten, festival ini diharapkan berkembang menjadi agenda wisata budaya yang memperluas pengenalan tradisi Burangasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperkuat posisi Buton Selatan dalam peta pariwisata nasional dan internasional.(*)

Senin, 26 Oktober 2026 | BAUB AU POST | www.baubaupost.com

Kabut Asap Memburuk, Satu Puskesmas Tangani 100 Pasien ISPA, Yusran Fahim Alihkan Siswa Baubau Belajar dari Rumah



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengalihkan pembelajaran siswa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke sistem daring mulai Selasa (20/10/2026), menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut ditempuh untuk melindungi kesehatan anak setelah konsentrasi partikel debu di sejumlah wilayah mencapai 114 mikrogram per meter kubik dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan meningkat.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan, hasil pengujian kualitas udara oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau per 19 Oktober 2026 menunjukkan konsentrasi partikel debu mencapai 101 mikrogram per meter kubik. Angka tertinggi ditemukan di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, dengan konsentrasi 114 mikrogram per meter kubik.

"Setelah kita pantau di beberapa puskesmas, kasus ISPA akibat asap ini meningkat tajam, bahkan di satu puskesmas ada yang menangani hingga 100 pasien per hari," kata Yusran dalam keterangan pers, Selasa (20/10/2026).

Peningkatan kasus gangguan pernapasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Meski demikian, siswa tidak diliburkan sepenuhnya, melainkan tetap mengikuti pembelajaran dari rumah melalui sistem daring. Para guru juga tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Yusran menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup satuan pendidikan TK, SD, dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Baubau. Adapun pengaturan pembelajaran pada jenjang SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah kota belum menetapkan batas akhir penerapan pembelajaran jarak jauh. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi lingkungan dan hasil pemantauan kualitas udara. Kegiatan belajar-mengajar secara langsung baru akan kembali dilaksanakan setelah kondisi udara dinilai membaik dan aman bagi kesehatan siswa.

Selain mengambil langkah di sektor pendidikan, Yusran meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar atau melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Warga juga diminta segera melaporkan titik api kepada petugas pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas dan memperburuk kondisi udara.

Pengalaman Indonesia menghadapi bencana kabut asap pada 2015 menunjukkan besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kebakaran pada tahun tersebut menghanguskan sekitar 2,61 juta hektare hutan dan lahan serta menyebabkan sekitar 600.000 orang mengalami ISPA. Bencana itu juga mengganggu kegiatan pendidikan, transportasi, dan perekonomian.

Dampak pencemaran udara juga menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa pencemaran udara ambien menyebabkan sekitar 4,2 juta kematian di seluruh dunia pada 2016. Paparan partikel pencemar berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan, terutama penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Data historis tersebut mempertegas pentingnya pencegahan sumber pencemaran serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Di Baubau, penerapan pembelajaran daring menjadi langkah sementara untuk mengurangi paparan asap terhadap siswa selama kualitas udara belum dinyatakan aman. Pemerintah daerah juga mengandalkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran agar kondisi lingkungan segera pulih dan kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung normal.(*)

BMKG Deteksi 683 Titik Panas di Sultra, Kabut Asap Berpotensi Ganggu Kesehatan, Warga Diminta Waspada hingga 25 Oktober



Laporan: Prasetio M

KENDARI, BP- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sulawesi Tenggara memperingatkan potensi kabut asap berkategori sedang hingga tidak sehat di sejumlah wilayah pada 23-25 Oktober 2026. Kondisi yang dipengaruhi asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lokal maupun wilayah lain itu berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta menurunkan jarak pandang di jalan raya, jalur pelayaran, dan penerbangan.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Kendari, Heri Purnomo, melalui siaran pers BMKG Sulawesi Tenggara Nomor e.B/ME.02.04/224/KKNI/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, menyampaikan bahwa citra satelit Himawari-9 masih mendeteksi sebaran kabut asap di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Pengamatan di stasiun meteorologi Baubau, Kendari, Ranomeeto, dan Pomalaa hingga pukul 09.00 WITA juga menunjukkan kondisi udara kabur akibat asap.

Jarak pandang mendatar di sejumlah lokasi dilaporkan dapat turun hingga kurang dari lima kilometer. Menjelang sore sampai malam, kepekatan asap diprakirakan berkurang sehingga jarak pandang dapat meningkat menjadi sekitar 8-9 kilometer, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara bagian timur dan selatan.

"Menjelang sore hingga malam hari, kepekatan asap diprakirakan berkurang dengan jarak pandang berkisar 8-9 kilometer," ungkap Heri dalam keterangan BMKG.

Pergerakan asap dipengaruhi pola angin yang umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2-15 knot. Asap dari luar Sulawesi Tenggara, termasuk Papua Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, dan wilayah sekitarnya, terbawa menuju provinsi tersebut dan bercampur dengan asap dari karhutla lokal.

BMKG juga mencatat 683 titik panas di Sulawesi Tenggara berdasarkan pemantauan satelit sensor VIIRS dan MODIS pada 21 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi masing-masing satu titik di Kabupaten Bombana dan Konawe Utara. BMKG menegaskan, titik panas merupakan anomali suhu yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis membuktikan terjadinya kebakaran.

Indeks kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 selama periode 23-25 Oktober diprakirakan berada pada kategori sedang hingga tidak sehat, dengan konsentrasi 15,5-150,4 mikrogram per meter kubik (Âµg/mÂ³). Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Paparan asap berisiko lebih besar bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Pada 23 Oktober, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kolaka Utara, Konawe Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Muna Barat, Kolaka Timur, Konawe, Bombana, Muna, Buton Utara, Buton Tengah, Konawe Kepulauan, Buton, dan Kota Kendari. Pada 24 Oktober, potensi kabut asap diprakirakan terjadi di Kolaka Utara, Konawe Utara, Kolaka, dan Konawe. Adapun pada 25 Oktober, wilayah yang berpotensi terdampak ialah Kolaka Utara, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, dan Konawe.

Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta menutup jendela rumah apabila asap mulai pekat. Kelompok rentan disarankan mengurangi kegiatan di luar rumah untuk meminimalkan paparan polutan. Pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika jarak pandang menurun, serta menggunakan lampu sesuai kebutuhan keselamatan dan ketentuan yang berlaku.

Ancaman kabut asap bukan persoalan baru di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan pada 2015, misalnya, menyebabkan pencemaran udara luas di sejumlah wilayah Indonesia dan berdampak hingga negara tetangga di Asia Tenggara. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa karhutla dapat berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat dan lintas batas, terutama ketika kondisi cuaca mendukung penyebaran asap.

Pada tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman kualitas udara pada 2021 yang memperketat rekomendasi paparan partikulat halus PM2.5 karena kaitannya dengan risiko kesehatan. Pedoman itu menegaskan pentingnya pengendalian polusi udara dan perlindungan masyarakat dari paparan partikel berbahaya. Dalam situasi kabut asap, pemantauan kualitas udara dan kepatuhan terhadap imbauan kesehatan menjadi bagian penting dari mitigasi risiko.

BMKG meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan cuaca dan kualitas udara melalui situs resmi www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta kanal informasi resmi instansi terkait. Kewaspadaan bersama diperlukan untuk mengurangi dampak kabut asap sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara. (*)